

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan sumber daya ekonomi yang substansial, yang mengakibatkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Masalah kemiskinan bersifat multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu seperti rendahnya produktivitas, tetapi juga oleh faktor sistemik dan kelembagaan yang mempertahankan kelanggengan kemiskinan lintas generasi. Kemiskinan bukan hanya akibat kegagalan individu, melainkan merupakan hasil dari struktur sosial, kebijakan politik, dan dinamika ekonomi yang lebih luas (Brady, 2006, 2019). Selain itu, kemiskinan bukan sekedar kekurangan sumber daya ekonomi, melainkan juga merupakan fenomena sosial yang terkonsentrasi dalam suatu komunitas (Martin & Petersen, 2019; Merolla *et al.*, 2011)

Kemiskinan di Indonesia memperlihatkan kemiskinan yang bersifat kronis, meskipun dalam beberapa kasus bersifat sementara, terutama jika memperhitungkan kedalaman kemiskinan. Fenomena ini seringkali dipicu oleh ketimpangan pendapatan, yang menjadi penyebab utama tingginya kemiskinan (Purwono *et al.*, 2021). Kemiskinan tidak hanya terbatas di satu kawasan, tetapi cenderung menyebar di wilayah lain, terutama pedesaan, yang semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan antara pedesaan dan perkotaan semakin parah karena bias dalam perumusan kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks lokal, semakin memperburuk aksesibilitas layanan sosial dasar dan infrastruktur (Chimhowu, 2009).



... distribusi pendapatan dan perubahan struktural keluarga yang ... dalam kemiskinan jangka panjang, terutama di pedesaan, menyebabkan truktural (Gong *et al.*, 2022).

Kemiskinan yang berlanjutan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap pembangunan berkelanjutan, sebuah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang (Erumban & de Vries, 2024). Dengan kompleksitas masalah kemiskinan ini, diperlukan pendekatan komprehensif dan sistemik untuk mengatasi dampak sosial ekonomi yang dihasilkan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan secara efektif (Affandi *et al.*, 2025).

Kemiskinan menjadi isu sentral dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada pilar pembangunan bidang sosial dengan tujuan “tanpa kemiskinan” yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (Bappenas, 2020). Fokus utama dari SDGs adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, yang diukur dengan pendapatan kurang dari \$1,25 per hari sebagai indikator kemiskinan absolut, mencerminkan standar kehidupan di negara-negara termiskin di dunia (Alkire & Foster, 2011; Ravallion *et al.*, 2009). Tujuan ini memastikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap guncangan iklim, ekonomi, sosial dan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang, guna memobilisasi sumber daya dan memperkuat kerjasama pembangunan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala dimensinya.

Berdasarkan Data World Bank (2023), sekitar 713 juta orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara lebih dari 3,5 miliar orang hidup dibawah garis kemiskinan moderat. Di Indonesia, kemiskinan bukan hanya sekedar fenomena ekonomi, melainkan manifestasi ketimpangan struktural yang mencakup dimensi spasial, demografis, dan akses terhadap sumber daya dasar. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi dan diakui sebagai kekuatan regional, paradoksnya jutaan warga masih hidup dibawah standar kesejahteraan minimum. Secara geografis,

bagai negara kepulauan menghadapi tantangan dalam penanggulangan Data Bank Dunia (1976) menunjukkan bahwa 70 persen penduduk miskin



berada di Pulau Jawa, namun distribusi regional kemiskinan mengalami pergeseran signifikan, dengan 46 persen di pedesaan luar Jawa. Pasca krisis 1998, proporsi penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan di Jawa turun tajam, diikuti peningkatan kemiskinan di pedesaan di luar Jawa. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 277,7 juta jiwa, dengan 25,9 juta jiwa (19,51%) tercatat sebagai penduduk miskin.

Ketimpangan spasial antara wilayah pedesaan dan perkotaan terlihat jelas, dimana wilayah pedesaan (14,16 juta atau 12,22%) lebih tinggi dibanding perkotaan (11,74 juta atau 7,29%). Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan keterbatasan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Jawa sebagai episentrum nasional, justru menampung lebih dari 13,62 juta jiwa penduduk miskin, sementara 12,28 juta orang miskin yang berada diluar pulau Jawa. Ketimpangan ini diperburuk oleh tekanan demografis, yang terus meningkat dengan ratio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 45,4 yang artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menopang 45 orang non produktif. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13%, (3,14 juta jiwa setiap tahun) semakin menambah beban kapasitas negara dalam menyediakan layanan dasar dan lapangan kerja.

Garis kemiskinan merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik, 2010, 2022, 2023), tercatat garis kemiskinan per kapita per bulan meningkat dari Rp.425.343 (2010) menjadi Rp.550.458 (2023), mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi dan harga kebutuhan dasar. Pola pengeluaran rumah tangga menunjukkan perbedaan signifikan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret tahun 2023 menunjukkan rata-rata pengeluaran/kapita/bulan



L.451.870 terdiri dari Rp.711.282 untuk makanan dan Rp.740.588 untuk n. Di perkotaan, pengeluaran makanan (*food*) sebesar Rp.769.112 dan

non makanan sebesar Rp.922.338. Sedangkan, di pedesaan untuk makanan sebesar Rp.630.962 dan non makanan sebesar Rp.488.157. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa rendahnya pendapatan masyarakat pedesaan, lebih ke akses yang terbatas terhadap barang dan jasa untuk menunjang kualitas hidup. Ketimpangan ini memperlihatkan peningkatan pendapatan belum merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data penduduk miskin pada publikasi BPS tercatat sebanyak 25,67 juta jiwa (2018), 24,79 juta jiwa (2019), melonjak ke 27,55 juta jiwa (2020) mengalami penurunan menjadi 26,50 juta jiwa (2021) dan 26,36 juta jiwa (2022). Tingginya jumlah penduduk miskin tentunya memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah sangat diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia tidak cukup dijelaskan hanya dengan persentase penduduk miskin (P0), karena indikator ini tidak menggambarkan seberapa dalam kemiskinan yang dialami. Data tahun 2023 (*Lampiran 2*) memperlihatkan persentase kemiskinan (*Poverty Headcount Index-P0*) sebesar 10,09%, namun di Papua (26,03%), Papua Barat (20,49%), dan Maluku (16,42%) melampaui angka tersebut. Lebih mengkhawatirkan, Papua mencatat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) sebesar 6,25 dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) sebesar 2,15, jauh di atas rata-rata nasional (P1:1,73; P2: 0,38), yang menandakan kemiskinan ekstrem. Efektivitas kebijakan publik dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada pendekatan fiskal yang dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, bukan hanya distribusi bantuan yang seragam, serta mempertimbangkan tingkat kerentanan. Ketimpangan antar daerah dapat melemahkan legitimasi politik dan memperburuk kesenjangan sosial, sehingga diperlukan strategi fiskal yang mempertimbangkan kedalaman kemiskinan sebagai indikator utama dalam mengukur

konsumsi masyarakat miskin dibawah garis kemiskinan. Berikut data kemiskinan di berbagai daerah yang ditunjukkan pada Tabel 1.1:



Tabel 1.1 Data Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK / Poverty Gap Index-P1) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2023 (Persen)

No	Provinsi	2010	2017	2023	Rata-Rata
1	Aceh	3,48	2,98	2,76	2,90
2	Sumatera Utara	1,79	1,71	1,26	1,54
3	Sumatera Barat	1,45	1	0,82	0,94
4	Riau	1,76	1,32	1	1,19
5	Jambi	1,21	1,28	1,2	1,26
6	Sumatera Selatan	2,38	2,24	1,72	2,16
7	Bengkulu	2,79	2,85	2,14	2,69
8	Lampung	2,99	2,16	1,64	2,07
9	Kep. Bangka Belitung	1,06	0,49	0,63	0,61
10	Kepulauan Riau	1,31	0,97	0,82	0,93
11	DKI Jakarta	0,64	0,49	0,7	0,58
12	Jawa Barat	1,68	1,45	1,17	1,35
13	Jawa Tengah	2,62	2,21	1,75	1,96
14	DI Yogyakarta	2,37	2,19	1,72	2,17
15	Jawa Timur	2,36	1,87	1,63	1,84
16	Banten	1,04	0,86	1,2	0,93
17	Bali	0,79	0,68	0,55	0,63
18	Nusa Tenggara Barat	3,74	3,13	2,38	2,71
19	Nusa Tenggara Timur	4,04	4,34	3,33	3,93
20	Kalimantan Barat	1,38	1,23	1,03	1,15
21	Kalimantan Tengah	1,14	0,84	0,66	0,82
22	Kalimantan Selatan	0,77	0,72	0,61	0,68
23	Kalimantan Timur	1,39	0,89	0,77	0,94
24	Kalimantan Utara	1,39	1,21	0,64	0,91
25	Sulawesi Utara	1,50	1,37	1,09	1,26
26	Sulawesi Tengah	3,19	2,55	2,12	2,44
27	Sulawesi Selatan	1,85	1,72	1,57	1,56
28	Sulawesi Tenggara	2,52	1,87	1,96	2,16
29	Gorontalo	2,77	3,68	2,92	3,21
30	Sulawesi Barat	2,32	1,88	1,8	1,89
31	Maluku	5,27	3,5	3,08	3,46
32	Maluku Utara	1,63	0,81	1,08	0,91
33	Papua Barat	7,24	6,74	4,94	5,90
34	Papua	8,14	7,5	6,25	7,02
	Indonesia	2,41	1,83	1,53	1,96

er Data: Berita Resmi Statistik, Lampiran 1 (Data diolah, 2025)



Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan variasi kedalaman kemiskinan yang signifikan antar provinsi di Indonesia, mencerminkan kesenjangan yang tinggi. kedalaman kemiskinan tertinggi secara nasional tercatat pada tahun 2010 sebesar 2,41, kemudian menurun 1,53 pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan terdapat 14 provinsi dengan IKK diatas rata-rata, mengindikasikan potensi resiko kemiskinan yang mendalam di wilayah-wilayah tersebut. Fenomena ketimpangan ini menunjukkan perlunya program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai pandangan Arason & Lofgren (2007) bahwa pemerintahan yang bijaksana adalah pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan daerah, yang dirancang untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berperan penting dalam mengidentifikasi penduduk miskin serta menyediakan sumber daya serta layanan untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah juga menunjukkan komitmennya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Bukti konkret komitmen pemerintah terhadap pemerataan pembangunan terlihat dari peningkatan signifikan pengeluaran pemerintah pusat melalui transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, realisasi anggaran TKDD mencapai 92,21 persen, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 101,37 persen. Sementara, realisasi belanja daerah pada tahun 2022 mencapai 98,92 persen, namun menurun menjadi 57,66 persen pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan, 2022, 2023).



tersebut tentunya mengejutkan, sebab pemerintah menetapkan gan kemiskinan sebagai prioritas utama dan telah mengucurkan anggaran

ratusan triliun rupiah untuk membiayai program-program kemiskinan. Oleh karena itu, lonjakan jumlah penduduk miskin berpotensi memicu munculnya berbagai tafsiran, bahkan tuduhan bahwa kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diimplementasikan secara massif selama beberapa tahun tidak cukup efektif untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat (Agussalim, 2022).

Peningkatan anggaran pemerintah menunjukkan upaya untuk memastikan pembangunan merata di seluruh daerah tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Alokasi anggaran yang optimal memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks teori ekonomi publik, kegagalan distribusi yang tidak terkoreksi oleh mekanisme pasar semestinya menjadi domain utama intervensi negara melalui kebijakan fiskal. Menurut Musgrave & Musgrave (1989) fungsi utama sektor publik dalam konteks distribusi (*distribution function*) menuntut peran aktif pemerintah sebagai agen korektif melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pajak progresif, subsidi dan program kesejahteraan, untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Kebijakan distribusi yang adil untuk mengatasi kemiskinan struktural dan sistemik yang berisiko memperkuat eksklusi sosial dan memperlemah legitimasi negara dalam menjalankan fungsi keadilannya, hal ini terlihat adanya ketimpangan dalam pengelolaan dana, keterbatasan fiskal daerah yang memperburuk kemiskinan jangka panjang, terutama di daerah yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya (Tang *et al.*, 2024).

Meskipun, pengeluaran pemerintah dapat menurunkan kemiskinan di negara-negara berkembang, dampaknya sangat rendah dan tidak merata. Hal ini dapat dicapai jika ada peningkatan anggaran yang konsisten dengan program yang tepat sasaran dan efektif (Bourguignon & Fields, 1997; Liu *et al.*, 2020). Kemiskinan tidak hanya

oleh aspek ekonomi, tetapi juga dimensi politik yang merupakan aspek
 i karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di negara berkembang



perlu mempertimbangkan aspek politik secara integral, dimana pemerintahan yang demokratis berperan penting dalam meningkatkan efektivitas bantuan luar negeri (Hunga *et al.*, 2023). Kemiskinan seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik yang terkait dengan kekuasaan dan keputusan kolektif terkait distribusi sumber daya. Sumber daya kekuasaan mempengaruhi para pemangku kepentingan politik, yang didorong oleh faktor kelas, untuk memobilisasi kekuasaan dalam kerangka negara dan ekonomi, kekuasaan yang timpang dan kebijakan negara yang akan memperburuk ketimpangan sosial (Brady & LM, 2016). Kebutuhan ekonomi memperkuat urgensi kebebasan politik, lembaga pemilu, dan partisipasi sosial, demokratisasi yang stabil dan dalam jangka panjang dikaitkan dengan penurunan kemiskinan (Sen, 1999).

Lebih lanjut, tingginya tingkat kemiskinan cenderung menunjukkan rendahnya demokrasi, sementara kualitas demokrasi yang lebih kuat memiliki kapasitas yang lebih besar dalam melaksanakan program kemiskinan secara efektif. Masyarakat miskin cenderung memiliki hubungan yang lemah dengan negara, ditandai oleh keterbatasan akses terhadap barang publik dan layanan berkualitas, dan suara yang kurang diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan publik. Akibatnya, manfaat kebijakan cenderung dinikmati oleh kelas menengah atas, bukan oleh masyarakat miskin (Calderon *et al.*, 2019; Ross, 2006).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk memahami dinamika kemiskinan secara kontekstual, diperlukan kajian yang mengintegrasikan aspek fiskal, demokrasi, arus investasi yang berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja, serta masalah ketimpangan wilayah. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam upaya mereduksi kemiskinan. Sebagai landasan empiris, data pada Tabel 1.2. memperlihatkan rata-rata variabel-variabel penelitian pada 14 provinsi berdasarkan

kemiskinan tertinggi di Indonesia:



Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah, Demokrasi Indonesia, Investasi, Ketimpangan Wilayah pada 14 Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2023 (Rata-rata)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	Demokrasi (Persen)	Investasi (Juta Rupiah)	Ketimpangan Wilayah (Persen)
2010	11.279.793,12	66,39	1.030.204,14	0,78
2011	13.335.055,79	64,75	2.659.127,34	0,72
2012	15.473.568,94	64,02	3.705.724,92	0,69
2013	17.715.219,13	63,49	6.247.337,97	0,66
2014	20.357.157,43	71,49	7.118.281,71	0,61
2015	23.913.357,72	70,71	7.813.093,85	0,63
2016	26.950.466,78	72,09	11.658.931,25	0,63
2017	28.566.048,48	72,11	11.956.086,97	0,65
2018	29.076.930,73	73,12	13.252.891,28	0,65
2019	31.506.127,77	73,84	13.304.960,25	0,60
2020	30.127.618,95	73,47	14.644.708,78	0,64
2021	30.287.697,76	75,41	16.696.363,15	0,68
2022	31.195.142,51	76,82	23.679.437,58	0,72
2023	28.586.215,62	75,64	23.484.599,60	0,79

Sumber Data: Lampiran 14, 11, 9, 6 (Data diolah), 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya dinamika dalam indikator-indikator utama pembangunan di Indonesia. Meskipun pengeluaran pemerintah meningkat signifikan dari Rp.11,28 triliun (2010) menjadi Rp.31,51 triliun (2019) dan mengalami fluktuasi hingga tahun 2023, lonjakan investasi yang berfungsi sebagai katalis utama pembangunan. Investasi meningkat signifikan dari Rp.1,03 triliun (2010) menjadi Rp.23,48 triliun (2023), Ketimpangan wilayah menunjukkan fluktuatif dengan indeks 0,78 (2010) dan menjadi 0,79 (2023), sementara indeks demokrasi stagnan, hal ini dapat menjelaskan adanya tantangan struktural yang menjadi hambatan pemerataan pembangunan dan masalah kesejahteraan. Data yang fluktuatif dan ketidakkonsistenan menunjukkan kompleksitas antara kebijakan fiskal daerah, kualitas demokrasi, investasi dan kesenjangan wilayah yang berpotensi memperburuk masalah di Indonesia.



Berdasarkan pengamatan data empiris dan latar belakang masalah kemiskinan beberapa literatur belum sepenuhnya mengeksplorasi interaksi peran

pengeluaran fiskal dan kualitas demokrasi dalam konteks kemiskinan regional di Indonesia. Berikut beberapa penelitian mengenai kebijakan fiskal terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan oleh Bafadal et al., (2020), Kharisma et al., (2020), Arfanita et al., (2023) Paramita & Purbadharmaja (2015), dan Alamanda (2020). Sementara itu, Hazmi et al., (2021) dalam penelitian tentang dampak demokrasi terhadap perekonomian terjadi melalui investasi, dimana stabilitas politik menjadi faktor penting bagi investor. Kou & Yasin (2024) Wietzke, (2019), Dörffel & Freytag, (2023) juga menemukan demokrasi berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh investasi dan ketimpangan antar wilayah. Beberapa kajian empiris oleh Parwa & Yasa (2019), Aloui et al., (2024), Do et al., (2021), Fadhilah et al., (2021), Khan et al., (2019), (Ucal, 2014), Wahyuningsih et al., (2019) menemukan bahwa investasi dapat menurunkan kemiskinan. Namun, kemiskinan diperparah oleh ketimpangan pembangunan antar wilayah yang disebabkan oleh kurangnya investasi, dan lemahnya program-program perlindungan sosial yang bersifat *pro* rakyat miskin (Elshahawany & Elazhary, 2024; Ginting, 2015; Nasution, 2020). Ketidaksetaraan memperlihatkan kompleksitas masalah yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Ketidaksetaraan tersebut memiliki konsekuensi negatif bagi masyarakat, seperti penurunan produktivitas, peningkatan kejahatan, ketidakstabilan politik, dan peningkatan penyakit (Atkinson, 2015).

Berdasarkan pengamatan empiris serta latar belakang masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesenjangan kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kesenjangan kemiskinan tertinggi. Dalam kajian ini, peneliti mengintegrasikan berbagai variabel untuk menganalisis hubungan antar faktor-faktor

m konteks permasalahan kesenjangan kemiskinan di Indonesia.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan ketimpangan wilayah di Indonesia
2. Apakah demokrasi berpengaruh terhadap kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan ketimpangan wilayah di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan ketimpangan wilayah di Indonesia
2. Untuk menguji, menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh demokrasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi dan ketimpangan wilayah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian bagi penulis diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dibidang ilmu ekonomi, khususnya dalam memahami interaksi antara kemiskinan, pengeluaran pemerintah, demokrasi, investasi, dan ketimpangan wilayah di Indonesia. Hasilnya akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan menawarkan perspektif baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan permasalahan kemiskinan.



- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai rujukan referensi serta informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dinamika kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Hasilnya dapat membantu dalam menentukan arah strategis pembangunan yang dapat mempercepat pengentasan kemiskinan daerah di masa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menjelaskan batasan-batasan masalah dalam kajian penelitian yang dilakukan, yang merupakan batasan subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti. Adapun batasan objek penelitian yakni Provinsi dengan kedalaman kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan menggunakan variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi kemiskinan antara lain: pengeluaran pemerintah, demokrasi, investasi dan ketimpangan wilayah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Berbagai Kajian Teori Terkait Kemiskinan

Pembahasan teori dalam kerangka umum mencakup prinsip dan konsep inti yang memungkinkan prediksi, penjelasan, serta uji implikasi dalam berbagai situasi. Teori yang efektif tidak hanya disertai dengan penelitian yang menjelaskan berbagai kasus, tetapi juga mampu menyatukan kasus yang tampaknya tidak konsisten tanpa mengabaikan prinsip dasar. Secara konkret, teori menjelaskan perbedaan kondisi kemiskinan antar individu dan wilayah. Sebuah teori dapat menjelaskan mengapa sebagian orang miskin sementara sebagian orang lainnya tidak miskin, serta mengapa kemiskinan lebih besar di wilayah tertentu dibandingkan wilayah lainnya.

Perbedaan pandangan menjelaskan perdebatan yang terjadi dalam sejarah pemikiran ekonomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teori ekonomi menjelaskan kompleksitas penyebab kemiskinan. Sejak era pencerahan, muncul pemikir-pemikir ekonomi yang menawarkan pandangan berbeda yang mendebat tentang cara terbaik mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Adam Smith, misalnya mengedepankan optimisme terhadap sistem pasar bebas dan kekuatan *invisible hand* yang diyakininya dapat menciptakan kemakmuran merata di seluruh lapisan masyarakat. Namun, pandangan ini ditentang oleh Karl Marx yang menilai bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai melalui sistem perencanaan terpusat yang dikendalikan oleh negara. Sementara itu, John Maynard Keynes menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi dan peran aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal



Meski ketiga tokoh tersebut berbeda dalam pendekatan, namun mereka sama-sama memandang bahwa kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh

faktor individual atau karakter masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas persoalan kemiskinan yang memerlukan solusi multidimensional dan pendekatan yang holistik (Skousen, 2015).

Kajian lebih lanjut dalam pandangan Nurkse (1971) yang mengungkapkan bahwa negara atau daerah yang tingkat kemiskinan tinggi, umumnya terjat dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle*). Menurut Nurkse, kemiskinan merupakan sebab sekaligus akibat yang saling berinteraksi, menciptakan kondisi terbelakang yang sulit keluar dari kemiskinan. Nurkse mengidentifikasi dua aspek dalam lingkaran perangkap kemiskinan, sisi penawaran (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*).

Pada sisi penawaran (*supply side*), rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh produktivitas yang rendah mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung, yang kemudian membatasi pembentukan modal. Akibatnya, produktivitas tetap rendah dan situasi kemiskinan berkelanjutan. Dari sisi permintaan (*demand side*), di negara-negara miskin, insentif untuk berinvestasi juga sangat rendah karena pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, yang dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah ini bersumber dari produktivitas yang rendah, yang mencerminkan terbatasnya pembentukan modal di masa lalu, yang mengarah pada kekurangan investasi yang berkelanjutan. Nurkse menyatakan "*a poor country is a poor because it is poor*" menggambarkan kemiskinan yang sulit diputuskan karena merupakan penyebab sekaligus akibat dari kemiskinan itu sendiri.

Teori kemiskinan dapat dipahami melalui berbagai perspektif, salah satu penjelasan yang relevan tentang teori kemiskinan yakni menurut pandangan Brady



n *Theories of the causes of poverty*, Brady menjelaskan secara f penyebab kemiskinan ke dalam beberapa kelompok teori yakni teori

perilaku (*behavioral theories*), teori struktural (*structural theories*), dan teori politik (*political theories*). *Behavioral theories* berfokus pada perilaku individu yang didorong oleh insentif dan budaya, kemiskinan dikaitkan dengan aspek perilaku yang dianggap sebagai mekanisme kunci yang secara langsung menyebabkan kemiskinan (Bertrand et al., 2004; Sawhill, 2003).

Sebaliknya, dalam *structural theories* mengungkapkan bahwa akar penyebab kemiskinan bukan hanya terletak pada individu, melainkan mengacu pada konteks demografi dan tingkat makro yang berperan dalam menciptakan peluang dan hambatan (Brady, 2019; Calnitsky, 2018; Carter & Barrett, 2006). Lebih lanjut menurut Brady (2019) bahwa struktur ekonomi dan demografi dapat mempengaruhi kemiskinan melalui tiga jalur: pertama, secara tidak langsung dengan menciptakan perilaku problematis; kedua, secara langsung melalui pengaruhnya pada perilaku; dan ketiga, dengan berinteraksi dengan perilaku untuk memediasi hubungan antara perilaku dan kemiskinan. Para strukturalis berpendapat bahwa kemiskinan merupakan produk dari sistem yang lebih besar yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi dan politik. Dalam konteks ekonomi mencakup pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, industrialisasi dan deindustrialisasi, serta ketidaksesuaian antara keterampilan dan pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan spasial dalam distribusi kesempatan ekonomi yang tidak merata.

Dalam konteks ini, *political theories* mengaitkan kemiskinan dengan struktur kekuasaan dan institusi yang membentuk ketidaksetaraan. Brady (2019) dan Brady & LM (2016) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari pilihan politik yang melibatkan relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya. Kebijakan pemerintah, yang sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, menjadi faktor penting dalam distribusi



gunaan. Mereka yang memiliki koneksi politik yang lebih kuat cenderung mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih

membutuhkan. Dengan demikian, kekuasaan dan institusi saling memperkuat dan memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Amartya Sen (1981) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, ekonomi, dan keamanan, serta terbatasnya kapabilitas dan kesempatan yang setara dalam masyarakat. Sen mengusulkan pengukuran kemiskinan melalui garis kemiskinan, menggunakan pendekatan seperti *headcount ratio* dan kesenjangan pendapatan terhadap ambang batas. Ia menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pangan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap hak politik. Dalam negara demokrasi, mekanisme pemilu memungkinkan kelompok miskin untuk mengoreksi pemerintah yang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan kebebasan politik serta akses informasi yang membuat negara demokrasi lebih responsif dibandingkan rezim otoriter. Sen menyoroti tiga fungsi kebebasan politik: sebagai ekspresi kapabilitas individu, sarana untuk memberi tekanan pada kebijakan publik, dan sebagai alat konstruksi sosial dalam menetapkan prioritas kebutuhan. Kebebasan politik dan pemenuhan ekonomi adalah dua pilar yang saling menguatkan dalam pembangunan berkelanjutan.

Pendapat ini sejalan dengan Chambers (1983) yang memperluas pemahaman tentang kemiskinan dengan menambahkan dimensi struktural. Kemiskinan, menurut Chambers, dipengaruhi oleh ketidakberdayaan (*powerless*), yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang memengaruhi kekuatan sosial (*social power*) individu dalam memperoleh keadilan dan hak atas kehidupan yang layak. Selain itu, kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) dan ketergantungan (*dependency*)



ak penting dalam kemiskinan. Ketidakmampuan individu atau kelompok
c mengatasi situasi darurat tanpa bantuan eksternal mencerminkan

ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Terakhir, keterasingan (*isolation*), seringkali disebabkan oleh lokasi yang terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan rendahnya akses terhadap fasilitas kesejahteraan dan memperburuk kondisi kemiskinan, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

Dalam upaya memahami kemiskinan, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, terdapat pendekatan ketimpangan yang memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperkecil ketimpangan yang ada, di mana meskipun kondisi ekonomi berubah, persentase orang miskin relatif tetap. Pendekatan lain adalah deprivasi relatif, yang membedakan antara "*feelings of deprivation*" (perasaan kekurangan) dan kondisi objektif deprivasi. Konsep ini mengacu pada perbandingan antara individu atau kelompok yang merasa kurang dalam hal pendapatan, kondisi kerja, atau kekuasaan dibandingkan dengan orang lain. Deprivasi relatif terkait dengan gaya hidup yang dianut oleh masyarakat dan dikembangkan dalam literatur sosiologi, dengan Stouffer *et.al.*, (1949) dan Merton (1957) sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep ini.

Dalam konteks ini, pengukuran kemiskinan menjadi penting, Haughton & Khandker (2009) menyatakan bahwa pengukuran kemiskinan memiliki empat tujuan utama. Pertama, pengukuran ini dapat memfokuskan perhatian pembuat kebijakan pada kehidupan masyarakat miskin. Kedua, dengan mengidentifikasi kelompok miskin, kebijakan yang lebih tepat dapat diterapkan. Ketiga, pengukuran berguna untuk

dan mengevaluasi proyek serta kebijakan yang ditujukan kepada



masyarakat miskin. Keempat, pengukuran kemiskinan juga penting untuk mengevaluasi kinerja lembaga yang bertujuan membantu masyarakat miskin.

Setiap teori kemiskinan memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan penyebab dan dampaknya. Teori-teori ini mencerminkan kompleksitas masalah kemiskinan yang memerlukan pendekatan yang multidimensional dan holistik. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, kita dapat memahami kemiskinan lebih mendalam dan mencari solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah sosial.

2.1.2 Ketimpangan Wilayah

Teori kemiskinan dan ketimpangan wilayah dapat jelaskan melalui berbagai perspektif teori. Brady (2019) dalam teori struktural (*structural theories*) menekankan bahwa kemiskinan dan ketimpangan wilayah bukan hanya fenomena pasar atau hasil perilaku individu, melainkan dampak dari struktur sosial ekonomi, demografis, dan politik yang mengakar. Struktur ini mencakup kondisi seperti industrialisasi, deindustrialisasi, integrasi pasar tenaga kerja, serta segregasi wilayah dan akses terbatas ke sumber daya seperti pendidikan dan transportasi. Pemerintah berperan penting dalam mengintervensi struktur ini melalui kebijakan pembangunan wilayah, distribusi sumber daya, dan penciptaan akses yang merata. Tanpa intervensi negara, struktur yang tidak adil akan terus menghasilkan ketimpangan wilayah dan memperburuk kemiskinan.

Berbeda dengan Brady, Gunnar Myrdal mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi dalam sistem kapitalisme menciptakan proses *sirkuler* dan kumulatif yang memperbesar kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal. Ketimpangan ini dipicu

si *backwash effect*, yaitu dampak negatif dari ekspansi ekonomi seperti ga kerja, perpindahan modal, dan perdagangan yang menguntungkan



daerah maju, sementara *spread effect* terdapat penyebaran pembangunan dari pusat ke daerah lain lemah. Mekanisme pasar yang berorientasi pada motif laba memperkuat kecenderungan investasi hanya pada wilayah yang menjanjikan keuntungan tinggi, sehingga memperlebar kesenjangan antar daerah. Dalam penjelasan Fenomena *circular and cumulative causation* menjelaskan bagaimana wilayah maju terus mengalami siklus pertumbuhan melalui peningkatan permintaan, investasi, dan pendapatan, sedangkan wilayah tertinggal terjebak dalam kemiskinan struktural akibat rendahnya daya saing dan keterbatasan akses terhadap investasi.

Myrdal menyoroti sisi negatif mekanisme pasar, bahwa investasi justru memperbesar ketimpangan regional. Modal cenderung mengalir ke wilayah yang sudah maju dan menguntungkan, seperti perkotaan atau kawasan industri. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep "*circular and cumulative causation*", yaitu siklus pertumbuhan yang terus berulang di wilayah maju. Dalam siklus ini, peningkatan permintaan mendorong investasi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga memperbesar kesenjangan dengan wilayah tertinggal. Dampaknya terhadap daerah tertinggal mengalami kesulitan menarik investasi karena daya saing yang rendah. Akibatnya, daerah tertinggal semakin terperangkap dalam kemiskinan struktural dan sulit keluar dari keadaan tersebut karena kekurangan akses terhadap investasi yang memadai, yang memperparah ketertinggalan mereka. Ketimpangan pembangunan ini menghasilkan efek sirkuler yang semakin memperbesar keuntungan wilayah maju dan membuat daerah tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalannya. Tanpa intervensi kebijakan yang bersifat redistributif, ketimpangan akan terus berlanjut, dimana daerah maju terus berkembang, sementara daerah tertinggal tetap stagnan (Jhingan, 2012).



Lebih lanjut, pendekatan Hirschman (1970) memperkaya analisis ketimpangan dengan menyoroti lemahnya *trickle-down effect* dari daerah pusat (*core*) ke daerah pinggiran (*periphery*), yang tidak mampu menandingi *polarization effect* yakni konsentrasi ekonomi yang semakin dominan di pusat dan memperbesar ketimpangan antar wilayah. Meskipun pembangunan dari pusat dapat merambah ke daerah lain, distribusinya tidak cukup kuat untuk mengimbangi arus balik yang merugikan daerah tertinggal. Oleh karena itu, Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan sebagai strategi untuk menciptakan efek penyebaran pembangunan yang lebih efektif dan inklusif. Tanpa intervensi kebijakan yang bersifat redistributif dan perencanaan spasial yang adil, ketimpangan regional akan terus berlanjut, dengan daerah maju semakin berkembang dan daerah tertinggal tetap stagnan.

Ketimpangan antar daerah seringkali muncul akibat perbedaan signifikan dalam kapasitas fiskal antara daerah kaya dan miskin. Prud'homme (2003) menjelaskan bahwa daerah kaya dengan kapasitas fiskal besar, dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan mengenakan pajak yang lebih rendah, sedangkan daerah miskin, dengan kapasitas fiskal terbatas, cenderung mengenakan beban pajak yang lebih tinggi, yang memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Ketimpangan fiskal ini juga memperkuat ketimpangan struktural yang lebih luas dalam pembangunan wilayah, karena daerah kaya dapat lebih mudah mengakses pembiayaan pembangunan, sementara daerah miskin terus terhambat.

Dalam pandangan teori Neo-Klasik tentang ketimpangan antar wilayah mengungkapkan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dan akan mencapai titik tertinggi sebelum akhirnya berkurang secara

ini sesuai dengan teori Kuznet yang menunjukkan pola U terbalik, dimana distribusi pendapatan meningkat pada tahap awal dengan PDB per kapita



rendah, namun setelah mencapai titik tertentu, distribusi pendapatan akan mulai merata.

Sama halnya dengan pendapat Neokalsik dan Kuznet bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan, Williamson mengenalkan salah satu metode untuk mengukur ketimpangan antar wilayah adalah Indeks Williamson (1965), atau *coefficient of variation* dalam ilmu statistik yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Indeks ini menunjukkan bahwa disparitas antar wilayah akan semakin besar pada tahap awal pembangunan, dan beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan disparitas termasuk migrasi penduduk produktif (usia kerja) dari daerah miskin ke daerah maju untuk memperoleh upah tinggi, serta aliran investasi yang lebih besar cenderung ke daerah yang berkembang karena faktor pasar yang menawarkan keuntungan relatif lebih besar, sementara resiko kerugian lebih kecil. Kebijakan pemerintah sering kali terkonsentrasi pada daerah maju, karena adanya kebutuhan yang lebih besar di wilayah tersebut, serta pola perdagangan yang didominasi oleh industri di daerah maju, turut memperburuk ketimpangan antar wilayah dan menghambat pemerataan pendapatan di daerah miskin.

Berdasarkan pandangan dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak hanya dapat dipahami hanya sebagai hasil dari mekanisme pasar, melainkan sebagai akibat dari ketidakadilan struktural dalam sistem sosial ekonomi suatu negara. Ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, ditambah dengan konsentrasi ekonomi di daerah pusat, semakin memperburuk ketimpangan. Meskipun ada upaya pemerataan pembangunan, efek yang lebih dominan seperti *polarization effect* menyebabkan ketimpangan antar daerah pusat dan pinggiran tetap ada. Metode pengukuran seperti Indeks Williamson digunakan untuk

ketimpangan antar wilayah, sementara kebijakan yang mengarah pada sumber daya di daerah maju memperburuk ketimpangan tersebut. Oleh



karena itu, diperlukan kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan, intervensi negara yang lebih kuat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih adil untuk menciptakan kesempatan yang merata antar wilayah.

2.1.3 Investasi Swasta

Dalam teori klasik, perdebatan utama mengenai investasi dapat dilihat antara Fisher dan Keynes. Fisher cenderung mendasarkan pada analisis kuantitatif dengan fokus pada perhitungan nilai sekarang (*present value*) dan tingkat bunga sebagai determinan utama investasi. Sebaliknya, Keynes berargumen bahwa keputusan investasi tidak hanya bergantung pada matematis, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi pasar, faktor psikologis investor, dan intervensi kebijakan pemerintah, serta menyoroti pentingnya sentimen pasar dan kecenderungan investor untuk berpindah antara aset-aset keuangan berdasarkan ekspektasi mereka tentang masa depan. Keynes menekankan pentingnya pengeluaran agregat masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta peran efisiensi marginal modal dan tingkat suku bunga dalam mendorong peningkatan investasi. Keynes juga menegaskan meskipun tanpa kenaikan investasi, kecenderungan konsumsi dapat tetap meningkatkan kesempatan kerja dalam jangka waktu tertentu (Baddeley, 2003).

Investasi dalam pandangan *structural theories* (teori struktural) menurut Brady (2019), investasi swasta dianggap sebagai elemen struktural yang mampu menciptakan lapangan kerja, ketersediaan upah layak, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Struktur ekonomi, seperti dinamika pasar tenaga kerja dan urbanisasi, turut mempengaruhi dinamika investasi dan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi dalam konteks ini tidak



: sebagai variabel keuangan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang membentuk pasar tenaga kerja dan produktivitas.

Investasi dalam kerangka kebijakan makro modern sebagaimana dikemukakan Mankiw (2021) yang menambahkan bahwa terdapat pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada peran sektor swasta, bertransformasi ke arah legitimasi atas pentingnya keterlibatan aktif pemerintah, bahkan melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta. Investasi diposisikan sebagai instrumen penting atau katalisator pembangunan jangka panjang yang mampu memperkuat fondasi ekonomi, memperluas kapasitas produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan standar hidup masyarakat. Pandangan ini menempatkan investasi sebagai elemen strategis dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks investasi global, investasi dibedakan atas dua jenis yang membentuk arus modal, yaitu *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *Foreign Portfolio Investment* (FPI). FDI adalah bentuk investasi langsung, dimana negara yang menanamkan modal secara *de facto* atau *de jure* memiliki kontrol atau pengawasan atas aset (aktiva) yang diinvestasikan di negara pengimpor modal. Bentuk FDI ini dapat berupa pendirian cabang perusahaan di negara pengimpor modal, kepemilikan mayoritas saham perusahaan oleh negara penanam modal, pembiayaan perusahaan di negara pengimpor oleh perusahaan asal negara penanam modal, pembentukan korporasi di negara penanam modal yang beroperasi di negara lain, atau penanaman aktiva tetap di negara pengimpor. Sementara itu, *Foreign Portfolio Investment* atau rentier yaitu investasi tidak langsung, yang lebih berupa penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah negara pengimpor modal), atas saham atau surat utang oleh warga negara dari beberapa negara lain. Penguasaan saham tersebut tidaklah sama dengan hak untuk mengendalikan

(Jhingan, 2012).



Dengan demikian, terdapat tiga spektrum besar dalam perdebatan teori investasi. Pertama, pandangan Klasik versus Keynesian mengenai determinan investasi apakah murni faktor rasional suku bunga, nilai sekarang atau juga faktor psikologis dan kebijakan. Kedua, pandangan pembangunan yang memperdebatkan apakah investasi menjadi solusi memutus kemiskinan. Ketiga, perdebatan modern tentang FDI, antara pandangan optimis mesin pertumbuhan, dan kritik (ancaman kedaulatan). Semua perspektif ini memperlihatkan bahwa investasi tidak hanya masalah finansial, melainkan isu multidimensi yang menyentuh aspek sosial, politik, dan struktural dalam pembangunan ekonomi global.

2.1.4 Demokrasi

Landasan teoritis mengenai demokrasi, diantaranya dikemukakan oleh Schumpeter (1947) bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem kelembagaan untuk pengambilan keputusan politik melalui perjuangan kompetitif untuk memperoleh suara. Dalam pandangan ini, demokrasi dipahami sebagai arena kompetisi antara kelompok yang ingin mempengaruhi kebijakan politik. Sebaliknya, Huntington (1991) menganggap pemilihan pemimpin yang kompetitif sebagai komponen utama dalam demokrasi, menekankan pentingnya legitimasi yang diperoleh melalui pemilu yang adil. Kedua pandangan ini berbicara tentang pemilihan yang bebas dan adil sebagai elemen kunci dalam demokrasi, namun dengan penekanan yang berbeda pada peran kompetisi dalam menentukan keputusan politik.

Lebih lanjut, demokrasi dalam pandangan Lipset (1959) yang mengaitkan hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi telah menghasilkan kajian luas dalam politik komparatif. Gagasan tersebut menjadi fondasi utama dalam teori

demokrasi, yang menekankan bahwa kemakmuran ekonomi, pendidikan
 aan kelas menengah dalam mendukung norma-norma toleransi politik



demokratis merupakan prasyarat sosial menjadi fondasi bagi demokrasi yang stabil. Gagasan ini berlandaskan pada pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dalam masyarakat yang kaya, dimana kemiskinan dibatasi sehingga memungkinkan partisipasi politik yang lebih rasional tanpa terpengaruh oleh *demagog*.

Dalam perdebatan mengenai konsekuensi ekonomi dari sistem politik yang berbeda. Terutama berfokus pada bagaimana rezim politik mempengaruhi kepentingan orang miskin. Sen (1981) dalam teorinya menekankan pentingnya sistem demokrasi dalam mengurangi kemiskinan dan mencegah kelaparan, yang dikenal dengan "Hipotesis Sen." Menurutnya, demokrasi lebih efektif dibandingkan dengan sistem otokrasi dalam menangani ketimpangan sosial. Demokrasi memungkinkan kebebasan politik dan hak-hak politik, yang menciptakan ruang bagi diskusi publik dan pemilu yang memungkinkan orang miskin untuk menyuarakan kebutuhan mereka serta meminta pertanggungjawaban pemerintah. Hal ini mengarah pada kebijakan yang lebih pro-rakyat, di mana pemerintah diharapkan bertindak lebih cepat dan strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Melanjutkan gagasan tersebut, Sen (1999) dalam bukunya *Development as Freedom*, memperluas pandangan bahwa demokrasi bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mencegah krisis besar melalui akuntabilitas publik. Partisipasi warga negara berfungsi sebagai kekuatan pengawasan yang mendorong pemerintah melalui mekanisme pemilu yang transparan dan kebebasan politik, menjaga stabilitas dan memenuhi layanan publik secara efektif. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi, pemerintah lebih cenderung untuk merespons kebutuhan rakyat karena adanya tekanan politik dari



Secara keseluruhan, Sen mengusung pandangan bahwa demokrasi penting dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif

serta berkelanjutan, dengan membuka ruang partisipatif politik bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pencegahan kelaparan.

Sedangkan, dalam pandangan *Theory Rational Public Choice* yang dikemukakan oleh James M Buchanan (2013), merupakan pendekatan yang menggabungkan konsep-konsep ekonomi dan ilmu politik untuk menganalisis proses pengambilan keputusan politik. Teori ini berfokus pada tiga prinsip utama, yaitu *Individualisme metodologis*, yang menyatakan bahwa semua keputusan politik dan masyarakat berasal dari tindakan individu; *pilihan rasional*, yang menganggap individu membuat keputusan untuk memaksimalkan manfaat pribadi; dan *politik sebagai pertukaran*, yang melihat keputusan politik sebagai transaksi keuntungan pribadi atau kelompok. Ketiga faktor tersebut yakni pemilih (*voters*), legislator (*legislator*), dan birokrat (*bureaucrats*) saling berinteraksi dalam konteks yang mirip dengan pasar, dimana mereka bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. *Public Choice Theory* menganggap bahwa meskipun mereka bertindak dalam kapasitas publik, mereka tidak sepenuhnya didorong oleh kepentingan umum. Sebaliknya, dipengaruhi oleh insentif pribadi yang menyebabkan kebijakan yang tidak efisien atau merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Sedangkan, dalam pandangan Barro (2000) menyoroti pentingnya sistem hukum yang kuat dan perlindungan hak milik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, meskipun demokrasi dapat meningkatkan stabilitas sosial. Barro mengidentifikasi bahwa negara dengan sistem hukum yang baik, meskipun tidak sepenuhnya demokratis, seringkali berhasil dalam meningkatkan kinerja ekonomi dibanding dengan negara yang demokratis namun memiliki kelemahan dalam aspek

keadilan. Dalam hal ini, reformasi seharusnya lebih fokus pada sistem lembaga hukum dan perlindungan hak milik, yang lebih efektif adalah faktor



penting dalam transisi negara dari kemiskinan menuju kemakmuran dibanding dengan sekedar demokratisasi yang tidak disertai dengan pembenahan hukum. Meskipun demokrasi dapat mendukung pertumbuhan, dampaknya terhadap ekonomi lebih ambigu, terutama karena retribusi pendapatan melalui kebijakan sosial dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi, meskipun berpotensi mengurangi ketimpangan sosial dan meredakan ketegangan. Pada akhirnya, stabilitas politik yang didorong oleh penguatan sistem hukum lebih penting untuk kinerja ekonomi yang berkelanjutan.

Disisi lain, teori demokrasi juga dipandang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi, dengan memperluas hak suara kepada kelompok yang lebih miskin. Melalui pemilu yang lebih inklusif, kebijakan publik yang *pro-poor* dapat diimplementasikan, seperti pajak progresif, dan transfer kekayaan. Teori klasik ini dijelaskan dalam model Meltzer & Richard, (1981), yang berargumen bahwa semakin besar proporsi pemilih miskin dalam suatu negara, semakin besar kemungkinan redistribusi dan pengurangan ketimpangan. Demokratisasi yang memperluas hak pilih kepada lebih banyak orang, pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Argumen tersebut diperkuat Acemoglu *et al.*, (2013) yang mengidentifikasi hubungan yang kompleks antara demokrasi, redistribusi kekayaan, dan ketimpangan, dengan faktor utama yang mempengaruhi distribusi kekayaan adalah sistem politik yang mengatur melalui hukum, kebijakan, dan institusi.

Selanjutnya, Acemoglu *et al.* (2015) berpendapat bahwa sebelum adanya demokratisasi, kebijakan yang menguntungkan kelompok berkuasa dapat memperburuk ketimpangan. Namun, setelah transisi menuju demokrasi, hambatan-hambatan tersebut dapat dihilangkan, meningkatkan upah bagi masyarakat miskin, dan

distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini menegaskan bahwa



bahwa meskipun demokrasi dapat menurunkan ketimpangan, kebijakan redistribusi yang lebih adil dan pemerintahan yang akuntabel.

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan teori ini menunjukkan bahwa demokrasi memiliki berbagai dampak yang kompleks terhadap kinerja ekonomi dan ketimpangan sosial. Sementara beberapa teoritikus seperti Lipset menekankan pentingnya kemakmuran ekonomi sebagai prasyarat bagi demokrasi yang stabil, pandangan lain seperti Sen dan Acemoglu menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berperan dalam peningkatan partisipasi politik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki distribusi kekayaan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Barro pentingnya sistem hukum yang kuat dan perlindungan hak milik sebagai faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi, meskipun demokrasi dapat mendukung proses tersebut.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Dalam konteks ekonomi makro, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan salah satu komponen penting dalam pembentuk produk domestik bruto (PDB), selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M), secara matematis dapat dirumuskan: $Y=C+I+G(X-M)$ (Romer, 2019).

Terdapat beberapa teori terkait pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya teori dari Wagner, Wiseman dan Peacock, serta Rostow dan Musgrave. Wagner berpendapat bahwa ada kecenderungan yang *inheren* untuk



bagai lapisan pemerintahan (seperti pemerintah pusat, negara bagian dan lokal) untuk bertindak secara intensif dan ekstensif. Meningkatkan aktivitas ekonomi, dimana

Wagner lebih menekankan tren jangka panjang dari pada perubahan jangka pendek dalam pengeluaran publik. Wagner mengemukakan ada hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, Peacock dan Wiseman fokus pada pola waktu dan belanja publik, sementara model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal pembangunan, pemerintah memainkan peran dominan dalam menyediakan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya, karena sebagian besar investasi masih berasal dari sektor publik. Pada tahap menengah, meskipun sektor swasta sudah mulai berperan lebih besar, pengeluaran pemerintah tetap penting untuk mengatasi penyebab kegagalan pasar, sehingga pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan. Pada tahap lanjut, pengeluaran pemerintah beralih dari penyediaan prasarana menjadi pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti program pensiun, pelayanan kesehatan, dan sebagainya (Todaro & Stephen, 2006). Sejalan dengan teori ini, Yavas (1998) dalam Martins & Veiga, (2013) juga berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang dalam menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pandangan Keynes bahwa investasi swasta sering kali tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama ketika terjadi ketidakpastian atau penurunan kepercayaan pasar. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya, yang akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong konsumsi. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, sekolah, atau fasilitas publik lainnya, akan

permintaan terhadap barang dan jasa serta mendorong sektor swasta investasi lebih banyak. Pengeluaran pemerintah, dalam hal ini, mengurangi



ketergantungan pada investasi swasta yang fluktuatif dan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi jangka panjang, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan fiskal ekspansif ini tidak hanya mengatasi ketidakseimbangan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperkuat dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah membantu mengatasi kekurangan investasi swasta dan meningkatkan perekonomian melalui permintaan agregat (Mankiw, 2021).

Meskipun pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif dalam perekonomian, tantangan utama yang dihadapi adalah langkanya tabungan sukarela dan tingginya tingkat konsumsi dan terjadi investasi di jalur yang tidak produktif dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya modal yang berasal dari pemerintah, sehingga diberikan kebijakan adanya investasi swasta dengan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mankiw, 2021).

Berbeda dengan pandangan teori aliran *Ricardian Equivalence* menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi tingkat investasi. Melalui pendekatan *Ricardian Equivalence*, peningkatan defisit anggaran akibat kenaikan pengeluaran pemerintah dianggap harus dibiayai pada saat sekarang atau dimasa akan datang. Konsekuensinya, pemotongan pajak saat ini harus disesuaikan dengan ekspektasi peningkatan pajak di masa mendatang. Implikasi dari asumsi ini adalah bahwa masyarakat akan menyesuaikan perilaku konsumsi dan tabungannya dengan menyimpan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kewajiban pajak dikemudian hari. Dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga tidak berubah/konstan, maka

pemerintah yang dibiayai melalui pajak tidak akan memengaruhi tingkat ara keseluruhan (Barro, 1989).



Dapat disimpulkan ada perbedaan pandangan dalam perdebatan antara teori tentang pengeluaran pemerintah terkait dampaknya terhadap perekonomian. Wagner mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang, sementara Peacock dan Wiseman lebih menekankan pada pola waktu pengeluaran publik. Rostow dan Musgrave, serta Yavas, berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah sangat penting di tahap awal pembangunan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan terus berlanjut di tahap menengah dan lanjut untuk memperbaiki kesejahteraan sosial. Pandangan Keynes menambahkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menggantikan kekurangan investasi swasta dan memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Namun, teori Ricardian Equivalence berpendapat bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan defisit anggaran tidak akan mempengaruhi investasi, karena masyarakat menyesuaikan tabungannya untuk mengantisipasi pajak masa depan, yang menyebabkan efeknya netral terhadap ekonomi.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan

Berbagai penelitian mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan temuan yang beragam. Secara teori, pengeluaran pemerintah diyakini dapat berperan dalam pengurangan kemiskinan, namun ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah belum mampu mengurangi kemiskinan.

Berikut temuan Chude *et.al.*, (2019) yang meneliti pengeluaran pemerintah dan di Nigeria dengan data *time series* periode 1980-2013. Menggunakan metrik deret waktu modern seperti uji akar unit, pendekatan kointegrasi uji teknik koreksi kesalahan dalam kerangka ARDL yang menghasilkan



perkiraan yang lebih kuat. Hasil temuan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak jangka pendek yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Nigeria. Beberapa penelitian yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah menurunkan kemiskinan antara lain Fan *et al.*, (2000); Ahmad & Bhatti (2024); Wu & Ramesh (2014); Mehmood & Sadiq (2010); Anderson *et al.*, (2018); Sasml & Sasml (2016); (Bafadal *et al.*, 2020; dan Wudil *et al.*, 2023).

Almajdob & Shtewi (2023) dalam penelitiannya tentang pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di negara-negara Spring Libya, Tunisia, Mesir dan Yaman selama periode 15 tahun (2000-2014), menggunakan analisis data panel. Hasil temuannya bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, sementara pengeluaran untuk pendidikan tidak berdampak terhadap kemiskinan. Walaupun, pengeluaran pemerintah dapat menurunkan kemiskinan di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik seperti di Libya, Tunisia, Mesir dan Yaman, hal ini ternyata dipengaruhi oleh faktor konflik sipil, turunnya produksi minyak dan pariwisata, serta lemahnya infrastruktur dan pelayanan publik. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan temuan Sepulveda & Martinez-Vazquez (2011).

Dalam penelitian Westmore (2018) mengungkapkan bahwa transfer pemerintah mampu mendorong penurunan kemiskinan di perkotaan dan pedesaan di lima provinsi China yakni Shanghai, Liaoning, Guangdong, Henan, dan Gansu). Penelitian ini menggunakan data survei rumah tangga representatif dari survei studi panel pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemerintah sebagian besar diterima oleh rumah tangga miskin yang masih berada dibawah garis kemiskinan, tetapi tidak cukup untuk melepas mereka keluar dari kemiskinan, sehingga masih banyak yang masih memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan. Tingginya



tingkat kemiskinan di daerah perkotaan daripada tingkat pedesaan di sebagian besar provinsi di China.

Liu *et al.*, (2020) dalam penelitian yang sama di China, dengan menggunakan data pada tahun 2010 hingga 2016, menggunakan *regresi spatial econometrik model*. Fokus analisisnya pengeluaran publik di pedesaan (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur, dan lingkungan hidup) kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Hasil analisis bahwa pengeluaran pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur signifikan menurunkan kemiskinan di pedesaan. Sedangkan pengeluaran lingkungan hidup tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian tersebut Berbeda dengan temuan Kharisma *et al.*, (2020) bahwa tren penurunan transfer sosial pemerintah yang mendasari stagnasi pengurangan kemiskinan dalam beberapa dekade.

Sedangkan, penelitian Nursini & Tawakkal (2019) yang meneliti tiga indikator desentralisasi fiskal yang digunakan untuk mengukur dampak terhadap pengurangan kemiskinan, yaitu pengeluaran pemerintah daerah, pendapatan pemerintah daerah, dan transfer antar pemerintah. Studi ini meneliti menggunakan regresi data panel untuk 33 provinsi di Indonesia selama 2010-2016. Hasil penelitian menemukan bahwa pendapatan pemerintah daerah dan transfer antar daerah memiliki efek signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, sementara pengeluaran pemerintah daerah tidak signifikan terhadap kemiskinan. Beberapa penelitian lainnya menemukan hasil tidak signifikan (Almajdob dan Shtewi, 2023; Arfanita *et al.*, 2023; Bourguignon & Fields, 1997; Omodero, 2019; Ukpata *et al.*, 2018).

Dalam studi empiris Alamanda (2020) mengkaji berbagai pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan dan kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia dari



tingga 2017. Dengan menggunakan metode *fixed effect*, *random effect*, *fully unrelated regression (SURE) system*. Hasil penelitian menemukan

bahwa pengeluaran bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah tidak berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, pengeluaran infrastruktur berkorelasi negatif terhadap ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan *random effect model*), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan *fixed effect model*). Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

Hasil penelitian Alfurqani *et al.*, (2021) menganalisis transfer pemerintah (Dana Alokasi Umum), belanja modal, dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan (menggunakan analisis indeks Williamson) antar Kabupaten/kota di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data tahun 2011-2020, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pemerintah dan investasi berpengaruh menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, berbeda dengan belanja modal yang memperlihatkan tidak ada pengaruh terhadap ketimpangan di Riau. Berbeda dengan temuan Budiman *et al.*, (2023) di 6 provinsi di Sulawesi bahwa pengeluaran transfer pemerintah (DAU dan DBH) berpengaruh positif terhadap ketimpangan.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen fiskal penting yang dapat mendorong investasi. Aksan *et al.*, (2019) melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan data *time series* dari tahun 2003 hingga 2017, dengan analisis jalur (*Path Analysis*) dan indeks Williamson. Hasil temuannya bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, kewenangan penerimaan berpengaruh terhadap ketimpangan antar daerah. Transfer fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan antar daerah, sedangkan variabel pembiayaan daerah tidak terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.



Sementara, Yasni & Yulianto (2020) dalam temuannya bahwa kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil, penelitian ini menganalisis kabupaten/kota di Indonesia, dengan menggunakan data panel, analisis dari tahun 2012 hingga 2016. Hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh terhadap peningkatan ketimpangan, sedangkan belanja sosial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia.

Temuan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Agnello *et al.*, (2016) yang meneliti 13 negara di Eropa selama periode 1980-2008, menggunakan panel data teknik model *dynamic panel regression* dengan *instrumental variables* (IV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi fiskal meningkatkan ketimpangan regional, terutama bila ukuran konsolidasi besar, komposisi berbasis pemotongan belanja publik (*spending cuts*), sedangkan konsolidasi berbasis kenaikan pajak tidak signifikan terhadap ketimpangan regional.

Wang (2005) dalam penelitiannya di Kanada pada periode 1961-2000, dengan mengevaluasi lima kategori pengeluaran pemerintah menggunakan pendekatan ekonometrik berbasis *cointegration* dan *error correction model* (ECM). Hasil menunjukkan pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh meningkatkan investasi, namun dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah menurunkan investasi. Begitupula temuan Adeyemi *et al.*, (2022) yang menemukan perbedaan hasil penelitian yang berbeda antara wilayah, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap investasi swasta di Afrika Barat dan Afrika Timur, namun di Afrika Tengah tidak signifikan terhadap Investasi swasta.

Dalam penelitian Afonso & Jalles (2015) yang meneliti pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di 95 negara maju dan berkembang (OECD) selama periode



dengan menggunakan data panel pada model estimasi *fixed effect model* dan *Generalized Method of moments* (SYS-GMM). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat beberapa variasi hasil, dimana pengeluaran pemerintah untuk kesehatan positif signifikan terhadap investasi swasta, sedangkan variabel pengeluaran untuk jaminan sosial dan pembayaran bunga dan subsidi berpengaruh negatif terhadap investasi khususnya di negara berkembang.

Sedangkan dalam konteks nasional, Wahyuningsih *et al.*, (2019) meneliti hubungan pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan kemiskinan di Provinsi Maluku, menggunakan data *time series* dari tahun 2005 dan 2016, dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap investasi swasta di Provinsi Maluku, investasi swasta secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Maluku.

Dalam penelitian berikut menjawab perdebatan teoritis mengenai apakah pengeluaran pemerintah mendorong (*crowd in*) atau menghambat (*crowd out*) investasi swasta. Hasil temuan Fitrianti *et al.*, (2015) yang menggunakan data *time series* triwulan selama periode 1985-2012 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mengurangi investasi swasta dalam negeri dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Secara khusus, pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik ternyata menghambat investasi swasta dalam jangka panjang. Selain itu, belanja kesehatan mengurangi investasi dalam jangka pendek, sementara belanja pendidikan akan mengurangi investasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2.2.2 Hubungan Demokrasi terhadap Investasi, Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan

Berbagai penelitian mengenai hubungan antara demokrasi dan tingkat kemiskinan telah banyak dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan temuan yang beragam. Secara teori, demokrasi diyakini dapat berperan dalam pengurangan ketimpangan karena pemerintah yang demokratis cenderung lebih responsif terhadap



kebutuhan masyarakat dan lebih fokus pada distribusi kesejahteraan. Namun, ada juga sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi demokrasi belum tentu mampu mengurangi kemiskinan.

Studi yang dilakukan Kou & Yasin (2024) meneliti pengaruh faktor-faktor politik terhadap kemiskinan di 24 negara berkembang selama periode 1997–2022. Dengan fokus penelitian pada korupsi, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan globalisasi politik. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan pendekatan *fixed effect model*, DK, 2SLS, dan GMM untuk menentukan dampak dinamis kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi politik menunjukkan hubungan negatif dalam model kemiskinan pendapatan.

Hasil tersebut berbeda dengan temuan Fambeu & Yomi (2023) yang meneliti demokrasi dan kemiskinan di 40 negara Afrika Sub Sahara selama periode 1999-2018, menggunakan *Generalized Method of Moments*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Afrika Sub Sahara. Hal ini karena respon yang lambat dari lembaga-lembaga demokrasi terhadap guncangan eksternal, terutama bagi politisi yang menghadapi tekanan pemilihan ulang, seringkali menghadapi keputusan kebijakan jangka pendek yang kurang optimal. Begitupula perluasan kebebasan sipil diidentifikasi sebagai faktor yang berpotensi memicu konflik terkait dengan distribusi pendapatan, yang pada gilirannya mempengaruhi efisiensi proses produksi dan redistribusi kekayaan.

Demokrasi secara teori dikaitkan juga dengan masalah ketimpangan, searah dengan temuan empiris Dörffel & Freytag (2023) yang meneliti keterkaitan antara tipe rezim demokrasi dan non demokrasi serta ketimpangan dan kemiskinan di 140 negara periode 1980-2018, dengan menggunakan *mix methode* untuk mengatasi

n endogenitas, dengan model estimasi panel dinamis. Hasil penelitian demokrasi elektoral tidak berdampak terhadap pengurangan tingkat



kemiskinan, sedangkan demokrasi memiliki hubungan yang kompleks dengan ketimpangan.

Hasil penelitian Bougharriou *et al.*, (2021) yang meneliti hubungan antara demokrasi dan penanaman modal asing di Arab selama periode 2002-2013. Penelitian ini menggunakan data panel pada 16 negara di Arab. Hasilnya menunjukkan bukti kuat adanya hubungan berbentuk U terbalik antara demokrasi dan penanaman modal asing (FDI), ini berarti bahwa demokratisasi seharusnya mendorong FDI jika suatu negara tidak cukup demokratis. Hasil temuannya bahwa efek asimetris demokrasi dan perpajakan berbentuk U. Artinya, pada tahap awal demokratisasi, demokrasi dikaitkan dengan perpajakan yang lebih rendah, yang mendorong FDI. Namun, ketika tingkat demokrasi tertentu tercapai, demokratisasi yang lebih dalam akan meningkatkan perpajakan yang menghambat FDI. Di dukung temuan Jensen, (2003) menunjukkan bahwa demokrasi menunjukkan hasil yang signifikan di negara-negara demokratis yang menarik lebih banyak FDI, dibandingkan negara-negara otoriter.

Sedangkan dalam penelitian berikut yang dilakukan oleh Tran (2022) di 34 negara selama periode 2002-2016. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan model regresi. Hasil penelitian demokrasi berpengaruh menurunkan pengeluaran R&D, yang menunjukkan bahwa lingkungan demokratis membantu perusahaan meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengurangi investasi berlebihan dalam proyek-proyek R&D.

Sedangkan, dalam temuan Li & Resnick (2003) menyimpulkan bahwa institusi demokrasi memiliki efek yang kompleks dan ganda terhadap aliran FDI . Meskipun ada peningkatan perlindungan hak properti sehingga meningkatkan aliran FDI, namun terdapat pembatasan terhadap modal asing, sehingga dapat membatasi penyaluran

← belakang dengan hasil temuan Hazmi *et al.*, (2021) yang meneliti terhadap penanaman modal asing di Indonesia, menggunakan data tahun



2015-2019 dengan teknik regresi data panel dengan *random effect model*. Dimana, hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing.

2.2.3 Hubungan Investasi terhadap Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan

Investasi merupakan variabel makro yang dikaitkan dengan masalah kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak investasi terhadap kemiskinan masih menimbulkan banyak kontroversi, beberapa kajian berikut menjelaskan pengaruh investasi yang dapat menurunkan kemiskinan, namun beberapa penelitian menemukan bahwa investasi belum mampu mendorong penurunan kemiskinan.

Do *et al.*, (2021) meneliti pengaruh investasi asing langsung (FDI) terhadap pengentasan kemiskinan di Vietnam. Studi ini menggunakan regresi data panel pada tingkat provinsi tahun 2010-2016, dengan uji *fixed effect model* serta model ekonometrika spasial. Hasil menunjukkan Penanaman Modal Asing (PMA) secara langsung berkontribusi terhadap kemiskinan, namun secara tidak langsung memperburuk kemiskinan melalui perdagangan internasional.

Begitupula, Fadhilah *et al.*, (2021) dalam penelitiannya mengenai investasi dan percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Studi ini menggunakan teknik regresi data panel, dengan periode penelitian tahun 2010-2020, dengan melalui uji model *fixed effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya investasi dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Khan *et al.*, (2019) dalam penelitiannya di Pakistan, menggunakan data *time* tahun 1985-2016, dengan metode analisis *autoregressive distributed lag* < memeriksa kointegrasi antara PMA dan kemiskinan. Hasil menunjukkan oot hasil yang kuat dari kointegrasi antara PMA terhadap pengurangan



kemiskinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio arus masuk PMA tidak terlalu tinggi di Pakistan, sehingga pemerintah dengan sumber daya keuangan yang terbatas harus meningkatkan kebijakan mengenai arus masuk PMA. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Pakistan yakni dengan memperbaiki lembaga, membangun zona perdagangan arus masuk PMA.

Hasil penelitian yang sama oleh Ucal (2014) meneliti hubungan antara investasi dan kemiskinan di 26 negara-negara berkembang dari UNCTAD dengan periode 1990 hingga 2009, dengan menggunakan regresi analisis data panel, dan mengembangkan model ekonometrik untuk menganalisis aliran FDI dan dampaknya terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara FDI terhadap pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan FDI di negara-negara tersebut lebih berfokus pada sektor padat karya yang berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, ketimbang FDI yang lebih berfokus pada padat modal. Dampak langsung terjadi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga, sementara dampak tidak langsung melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong perbaikan standar hidup. Beberapa penelitian juga yang menemukan investasi berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan (Paramita & Purbadharmaja, 2015; Parwa & Yasa, 2019; Wahyuningsih et al., 2019).

Berbeda dengan penelitian berikut oleh Ainunnisa & Riyanto, (2019) yang menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian yang sama oleh Alfurqani *et al.*, (2021) yang mengindikasikan bahwa peningkatan modal investasi tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan, bahkan dapat memperburuk kemiskinan. Begitu pula temuan Hanoteau, (2023) yang melakukan penelitian di Indonesia, mengkaji tingginya kehadiran perusahaan

(MNEs) asing yang justru tidak mampu mengurangi jumlah penduduk
 ahan memperburuk kedalaman serta tingkat keparahan kemiskinan.



Sementara, Aloui et al., (2024) menemukan hasil yang beragam dalam penelitian di Negara-negara Sub Sahara African pada periode 1996-2017. Hasil temuannya bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan di negara-negara Afrika Sub Sahara, ECCAS, IGD, dan SAD, sedangkan berpengaruh positif di ECOWAS. Sedangkan, penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara investasi terhadap kemiskinan (Febriaty & Nurwani, 2017; Sutikno et al., 2019).

Berikut kajian investasi dan ketimpangan regional oleh Azim A et al., (2022) yang menganalisis 33 provinsi di Indonesia, dengan periode penelitian 2015-2018. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan *fixed effect model*. Data ketimpangan pembangunan menggunakan analisis Indeks Williamson dan investasi (PMDN dan PMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, sedangkan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Investasi diharapkan dapat mendorong sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia. Penelitian tersebut selaras dengan temuan Islami & SBM (2018) dan Alfurqani et al., (2021).

Berbeda dengan hasil penelitian Lessmann (2013) yang menganalisis 55 negara, dengan periode 1980-2009, dan menggunakan regresi data panel. Temuannya bahwa FDI cenderung meningkatkan ketimpangan regional, terutama karena distribusi modal yang tidak merata diantara wilayah, contohnya di China dan India. Hasil ini diperkuat oleh temuan Toatubun (2011) menemukan perbedaan dampak antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing, dimana PMDN tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sementara PMA justru

meningkatkan disparitas pembangunan di Wilayah Timur Indonesia.



2.2.4 Hubungan Ketimpangan Wilayah dan Kemiskinan

Berikut hasil penelitian dari Kouadio & Gakpa (2022) yang menguji hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Afrika Barat dengan data *time series* periode 1984 – 2015, penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa ketimpangan menurunkan kemiskinan di Afrika Barat. Selain itu, kelemahan kelembagaan di Afrika Barat seperti konflik yang persisten, ketidakstabilan politik, tata kelola yang buruk, infrastruktur fisik yang tidak memadai, dan rendahnya modal manusia, dapat menjelaskan ketimpangan dan kemiskinan di wilayah tersebut.

Sedangkan, hasil temuan Ginting (2015) yang menghubungkan ketimpangan pembangunan wilayah dan kemiskinan di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif periode 2004-2013, dengan menggunakan regresi data panel. Hasil temuan bahwa ketimpangan pembangunan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Implikasi kebijakan yakni pemerintah harus melakukan *crash program* untuk mengatasi lebih dalam ketimpangan pembangunan, sehingga kemiskinan dapat menurun di Indonesia. Hasil penelitian tersebut searah dengan temuan N. D. Ginting & Ginting, (2023).

Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan bersifat kompleks dan tidak selalu linear. Ketimpangan dapat berdampak menurunkan atau justru meningkatkan kemiskinan, tergantung pada kondisi struktural dan kelembagaan di suatu wilayah. Ketimpangan antar wilayah, baik pada level regional maupun lokal, menunjukkan perbedaan yang signifikan dan berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terarah diperlukan untuk mengatasi disparitas pembangunan guna menekan angka kemiskinan

lanjutan.

